

**BAB III**

**PERAN IDEOLOGI BAGI APARATUS NEGARA MENURUT LOUIS**

**ALTHUSSER**

**A. Ideologi Menurut Louis Althusser**

Ideologi secara sistematis dalam lajur pengetahuan sudah diungkapkan pada akhir Abad ke 18 oleh Desturt de Tracy , dimana dia memandang Ideologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Disisni ideologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dianggap netral . sebagai ilmu pengetahuan tentang ide, ideologi didasarkan atas observasi dan bebas dari prasangka, yang dianggap sebagai basic pendidikan dan ketertiban moral (moral order). Aliran “ideolgies” dari De Tracy mengikuti tradisi Pencerahan Prancis dalam kepercayaanya bahwa akal adalah alat kebahagiaan utama.<sup>129</sup>

Ideologi dalam pandangan Louis Althusser, memang tidak bisa dipisahkan dengan kajian ideologi yang dikonsepskan oleh Marx. Marx bagi Althuser memberikan pengertian yang sangat berbeda dengan perumus ideologi terdahulu, seperti Destut de Tracy yang hanya memberikan pengertian ideologi dalam batas teori genetic mengenai ide-ide dimana ideologi hnaya dipandang dari bagaimana asal usul ide itu tercipta. Marx melangkah melampauinya dengan melihat ideologi bukan hanya pada sekumpulan gagasan tapi ideologi diartikan sebagai representasi yang mendominasi pikiran

---

<sup>129</sup> Lamin Jassa, *Kerajaan Ideologi LPKSM*, Yogyakarta, 1997, hal.20-21

seseorang atau kelas sosial tertentu.<sup>130</sup> sehingga tidak ada netralitas dalam pembahasan ideologi dan Ideologi disini timbul atas prakatek materialisme, bukan sebuah gagasan yang terbentuk dalam alam ide, yang meyakini realitas materi adalah bagian dari sekunderisasi ide.

Penjabaran ideologi yang diungkapkan oleh Althusser dalam analisisnya merupakan teori tentang ideologi *secara umum*, ideologi yang nantinya akan menjadi kesatuan dari ideologi-ideologi yang bersifat regional yang terspesifikasi dalam beberapa aspek misalkan seperti; agama, politik, etika, legal dan sebagainya.

Secara eksplisit Marx, dalam *German Ideologi* menampilkan teori tentang ideologi dalam karya tersebut Louis Althusser menganggap tidak berwatak Marxian. Dengan menggunakan konsep “keterpisahan epistemologi” Louis Althusser berpendapat, telah terjadi sebuah kevakuman teori Marx saat menulis *German Ideologi* dan memaksukan karya tersebut dalam sebuah priode “Transisi” dan seperti yang dikatakannya dalam *For Marx*;

”I propose to designate the writings of the break in 1845, that is, the *Theses on Feuerbach* and *The German Ideology* which first introduce Marx’s new problematic, though usually still in a partially negative and sharply polemical and critical form, by a new formula: *the Works of the Break*. ”<sup>131</sup>

“ saya usulkan untuk memilih tulisan-tulisan “keterpisahan” pada tahun 1845, yaitu, *Theses on Feuerbach* dan *The German Ideology* yang pertama kali memperkenalkan Marx problematis baru, walaupun pada umumnya masih di dalam suatu hal negatif secara parsial dan sangat berpolemik dan berbentuk kriis, dengan rumusan baru *The Work of the Break*.”

<sup>130</sup> Althusser, Louis. *Tentang Ideologi*, Jalasutra, Yogyakarta, 2006 hal 35

<sup>131</sup> Althusser, Louis. *For Marx*, Sumber ;

*German Ideologi* karya Marx ini, bagi Althusser mencapai tatanan teoritis yang mengandung problematika baru tentang ideologi, rumusan ideologi dianggap sebagai jalinan imajiner yang murni seperti sebuah mimpi yang kosong dan hampa,<sup>132</sup> dengan memberikan sebuah pengkonsepsian, ideologi adalah bentuk dari penjungkirbalikan atas alam material yang melingkupi masyarakat. Ideologi dibangun atas residu murni yang berbentuk imajiner serta mengandung mistifikasi yang begitu kuat, ideologi diartikan sebagai aspek negatif. Sebagai sebuah realitas yang berlangsung diluar individu, dia hadir dalam penjabaran atas reidu-residu murni yang berlangsung dalam kenyataan yang kongkrit. Keberadaan ideologi yang berada diluar individu inilah, yang merupakan aspek utama menjadikan ideologi tidak berada dalam ruang sejarah yang sebagaimana telah tercantum dalam *German ideology*. Dimana sejarahnya berlangsung diluar sejarah yang kongkret tersebut, sehingga ideologi pada dasarnya tidak punya sejarah dalam artian yang negatif.

Namun Louis Althusser menyakini *ketiadaan sejarah* dalam pengertian ideologi secara umum tapi dia mencoba membuang sifat negatif (sejarah yang bersifat eksternal terhadapnya) dengan mengembalikan ensensial ideologi dalam artian yang positif. Ideologi itu berada dalam kenyataanya, bahwa dia dilingkupi oleh struktur dan dia (ideologi) yang melaksanakan fungsi dari struktur tersebut sehingga menjadikanya sebuah realitas yang *non-hisroris*, sedangkan sifat struktur dan penjalanan fungsinya

---

<sup>132</sup> Althusser, Louis. *Filosofit Sebagai Senjata Pemulsi*. On Citahel 187

merupakan realitas yang selalu ada dalam sejarah, dan sejarah disini harus didefinisikan oleh *communis manifesto* sebagai sebuah sejarah perjuangan kelas.<sup>133</sup>

Bagi Louis Althusser untuk membedah realitas struktur dan pelaksanaan fungsi ideologi, dia mengajukan dua tesis yang satu berkaitan dengan obyek, yaitu 'hal yang digambarkan' dalam bentuk imajiner dari ideologi, mempunyai sifat negatif dan yang kedua berkaitan dengan materialitas ideologi dan lebih bersifat positif.

**Tesis pertama; Ideologi menggambarkan hubungan imajiner antara individu-individu dengan kondisi-kondisi riil eksistensi mereka.**

Kepercayaan kita pada sebuah kebenaran yang menyikap dalam berbagai aspek baik dalam level, sosial, politik, agama, etis dan lain-lain menjadikannya sebagai sebuah 'cara pandang' yang merupakan titik mula gejala ideologi yang tersepsifikasi secara regional dalam beberapa aspek tadi. Misalkan dalam aspek ideologi politik, subjek yang berada dalam kepercayaan yang terlingkup dalam ideologi politik tersebut, subjek tersebut akan menjalankan pesan dan menempatkan posisinya pada ketertundukan akan nilai-nilai yang terangkum dalam ideologi politik tersebut. Dan pembahasan ideologi yang diungkapkan oleh Louis Althusser merupakan sebuah kajian kritis terhadap ideologi itu sendiri, dimana ideologi tidak hanya terlihat dalam permukaan kajian

Penyelidikan atas ideologi kali ini, seperti para ahli *etnologi*<sup>134</sup> mempelajari mitos-mitos dari sebuah ‘masyarakat primitif’. dimana ‘cara pandang atas dunia’ lebih bersifat imajiner dengan kata lain tidak berkorespondensi dengan realitas, ideologi diartikan sebagai sebuah ilusi.<sup>135</sup> pengorespondensian merupakan sebuah proses kita memahami realitas yang ada diantara fenomena yang terjadi disekitar subjek, sebagai sesuatu yang harus disikapi dan proses penyikapan tersebut bersifat imajiner.

Feurbech, misalkan melihat ketidakmampuan manusia dalam menyikapi esensial yang ada dalam dirinya merupakan bentuk munculnya ideologi religiuistik. Manusia mulai mencerminkan dirinya pada kekuatan yang berada diluar dirinya, yaitu kekuatan yang lahir dalam alam irasionalitas manusia yang nantinya akan membungkan kesadaran atas alam material . Pada akhirnya menimbulkan sikap yang pesimistis atas kemampuannya sebagai sebuah subjek sejarah, dan ideologi religiuistik itu tidak lain merupakan produk manusia itu sendiri, seperti yang dikatakannya;

“Religion..., is the expresion of how man related to himself, or more correctly, to his esensial being; but he relates to his essential being as to another being, The Divine Being is the nothing other than the being of man himself, or rather, the being of man abstracted from the limits of the individual man on the real, corporeal man and objectified, i.e. comtepelated and worshiped as another being, as a being distingueished from his own.”<sup>136</sup>

“Agama..., adalah ajaran tentang bagaimana manusia berelasi dengan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya berelasi dengan esensinya sendiri, hanya saja esensi itu dipandang sebagai pesona tersendiri yang alin dari dirinya.

---

<sup>134</sup> Etnologi berasal dari kata *Ethos* yang berarti bangsa, dan *Logos* yang berarti ilmu, menurut Koentjoroningrat, Etnologi ingin mencapai pengertian tentang azas-azas manusia dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam masyarakat dari sebnyak mungkin suku-suku bangsa yang ada di dunia, sumber; Sutardi, Tedi. *Antropologi: Mengungkap Keberagaman Budaya*; Grasindo Media Utama, Jakarta hal 65

<sup>135</sup> Althuser, Louis. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi ... Opcit* hal 191

<sup>136</sup> Ludwid Feurbech, *The Essence Of Christianity*, Sumber;

<http://Marxist.org/archiv/feurbech/works/essence/cp00.htm> diakses pada 15 januari 2010

Tuhan tak lain manusia itu sendiri, atau lebih tepatnya manusia yang dilepaskan dari batas-batasnya sebagai manusia yang kongkret dan bertubuh. Tuhan adalah esensi manusia yang ditempatkan diluar diri manusia, dengan kata lain direnungkan dan disembah sebagai Ada terpisah, sebagai Ada yang terpisah dari diri manusia.”

Interpelasi yang ada merupakan bentuk penggambaran realitas yang terefleksikan atas gambaran imajiner atas dunia, yang menjadikan ideologi dalam atrian disini sebagai pemutarbalikan atas kondisi-kondisi atas dunianya yang kongkret. Sehingga penjabaran terhadap alinasi (keterasingan) yang terjadi dalam wilayah material lebih disebabkan atas ketidakmampuan menyikapi realitas dunia riil mereka.

Louis Althusser beranggapan bahwa bukan kondisi riil mereka yang menggambarkan relitas dirinya dalam bingkai ideologi tapi lebih pada sebuah penggambaran relasi-relasi atas kondisi-konsi eksistensi mereka, dan relasi-relasi inilah yang merupakan pusat dari setiap penggambaran ideologi atau imajiner dari dunia riil. sehingga sifat imajer dari relasi inilah yang mendasari distorsi imajiner yang teramati dalam ideologi. Berbicara dalam kajian Marxis, Louis Althusser memberikan sebuah penjelasan bahwa, reposisi individu dalam kajian sistem sosial yang berada dalam pos-pos agen produksi, eksploitasi, represi bersumber dari relasi-relasi produksi dan juga oleh relasi-relasi produksi tersebut, dan ideologi disini dengan interpelsai imajinernya mendistorsi kenyataan tersebut. Dan karena itu, yang tergambar dari bingkai ideologi bukanlah relasi-relasi yang riil yang menjadi pengaruh terhadap eksistensi individu, namun sebuah relasi-relasi imajiner individu tersebut dengan relasi-relasi sosial yang kongkret dimana mereka berada.<sup>137</sup>

<sup>137</sup> Althusser, Louis. *Essays on Ideology*. London: Routledge, 1984.

**Tesis Kedua; Ideologi memiliki sebuah eksistensi yang material.**

Ketika individu-individu hidup dalam mempresentasikan dunia (yang bersifat keagamaan, etis dan sebagainya) dengan distorsi imajiner dan tergantung pada hubungan imajiner mereka, dalam bentuk relasi-relasi produksi maupun relasi kelas, Maka mereka berada dalam bingkai ideologi ( ideologi = relasi imajiner atas relasi-relasi nyata), dan bentuk dari relasi imajiner tersebutlah yang memiliki eksistensi material. Misalkan kepatuhan terhadap Negara yang merupakan reduksi dari nilai-nilai ideologi Negara, dalam bentuk kepercayaan atas segala kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum formal seperti peraturan perundang-undangan, maupun Peraturan Pemerintah sekalipun.

Kepercayaan tersebut merupakan turunan dari ide-ide individu yang bersangkutan yang telah berada dalam bentuk representasi ideologi yang dibentuk atas dasar nilai-nilai kepentingan ideologis Negara yang mereduksi ideologi sebagai sebuah ide-ide yang memiliki eksistensi hukum, dalam gagasan hukum yang dibentuk Negara, kebebasan individual dipertimbangkan, yakni dari dirinya sendiri sebagai subjek berkesadaran dengan keyakinan yang dipercayainya. Seperti yang dikatakan oleh Louis Althusser sendiri;

“Ideologi dalam dirinya terpaksa harus mengakui bahwa setiap ‘subjek’ yang memiliki sebuah ‘alam kesadaran’ dan percaya akan ‘ide-ide’ bahwa ‘kesadaran’-nya lah yang mengilhami dia dan dia menerima dengan bebas, harus-bertindak sesuai dengan ‘ide-ide’-nya, karena itu niscaya mengejawantahkan ide-idenya sendiri sebagai subyek yang bebas dalam

Dengan cara inilah terbentuk subjek material (sikap) dari subjek tersebut yang timbul dari konsekuensi alamiah ketika terbentuk sarana konseptual yang sepenuhnya berwatak ideologis. Dimana subjek yang memiliki kesadaran untuk membentuk dan memahami ide-ide yang diyakininya. Karena memang ideologi yang ideologis di paksa untuk mengakui bahwa setiap subjek diberkahi sebuah 'kebebasan'. Individu tersebut akan bertindak sebagai sebuah subjek yang bebas yang bertindak berkesesuaian dengan ide-idenya.

Selain itu Althusser mengatakan<sup>139</sup>, ideologi berbicara dalam tindakan-tindakan yang disisipkan dalam sebuah praktek-praktek. dan apabila bertindak (dalam praktik material) tidak berkesesuaian maka dia disebut sebagai sebuah pelanggar (bertindak jahat). Individu akan mengadopsi sebuah sikap praksis tertentu, dan mereka juga berperan secara berkala dalam praktek-praktek ideologis yang merupakan ritual dari Aparatus Ideologis, sehingga ide-ide yang dimiliki individu 'tergantung', dan disini dia berperan secara bebas sebagai sebuah subjek. Jika dia percaya pada ketentuan kebijakan yang dikeluarkan Negara, maka dia akan menjalankan kebijakan Negara tersebut, dan jika ada yang menentang kebijakan Negara tersebut, maka dia akan berada di barisan yang menolak, element yang mengkritisi kebijakan Negara dan bentuk ideologisasi ini juga berada dalam level lainya misalkan, Jika kita juga percaya akan konsep keadilan, maka ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ditanamkan dari rasa keadilan tersebut akan menimbulkan tindakan praksisnya dengan membentuk tindakan

yang lainnya seperti penggunaan media masa, pembuatan pamflet, liflet dan yang lainnya. Tindakan praksis seperti inilah yang merupakan wujud dari material dari ideologi.

Praktek-praktek subjek merupakan wujud pengejawantahan dari tindakan-tindakan eksistensi material dari ide-ide yang sudah diatur oleh ritualitas Aparatus Ideologi dan *dari apparatus ideologis itulah ide-ide yang dianut subyek itu timbul*. Dari sinilah juga ide-ide itu menghilang, dan yang tersisa hanya, *subjek, kesadaran, kepercayaan dan tindakan-tindakan* dari inilah Louis Althusser memberikan sebuah gagasan tentang esensi sebuah subjek. "Tidak ada praktik (apa pun) kecuali dan melalui dalam ideologi, dan tidak ada ideologi kecuali oleh subjek dan untuk subjek".<sup>140</sup> dalam menegekplisitkan keterangan diatas tentang "tidak ada ideologi apa pun kecuali melalui subjek dan demi subjek" artinya tidak ada ideologi kecuali bagi subjek-subjek<sup>141</sup> yang kongkret, dan peruntuntukan ideologi ini hanya mungkin karena adanya subjek, melalui kategori subjek dalam bentuk fungsionasisinya. Singkatnya ideologi memanggil atau menginterpelasi individu-individu sebagai subjek-subjek kongkrit. Yaitu dengan cara ideologi beroperasi dalam bentuk penyebutan ataupun pemanggilan, dalam menjalankan fungsinya. Sehingga ideologi mampu merekrut subyek-subyek di antara individu-individu, seperti yang dikatakan oleh Louis Althusser, sendiri;

---

<sup>140</sup> Ibid hal 47

<sup>141</sup> Istilah subjek memiliki dua arti, satu; subjektifitas yang memiliki kebebasan, sebuah pusat inisiatif, pencipta dan penanggung jawab atas tindakan-tindaknya sendiri, Dua; individu yang tunduk, yang

“Saya, menyarankan bahwa ideologi ‘bertindak ‘ ataupun ‘berfungsi’ dengan suatu cara yang ‘merekrut’ subjek-subjek diantara individu-individu (ideologi merekrut mereka semua) melalui operasi yang sangat presisi, yang saya namakan *interpelasi* atau memanggil; ‘hai, kamu yang disana’ ”<sup>142</sup>

Contoh interpretasi tersebut misalkan kita mengenal seorang teman (dan sebaliknya) dan kita menyapanya dengan ‘Hello teman’ dan kita akhirnya menjabat tanganya dan praktek ritual yang berlangsung dalam contoh tadi itu merupakan bentuk pengenalan ideologi menurut Louis Althusser<sup>143</sup>, proses ritualitas praksis (seperti berjabat tangan) menunjukkan kepada kita bahwa kita telah menjadi sebuah subjek, dengan sebuah fakta adalah kita mempunyai nama sendiri yang dikenal sebagai sebuah subjek, dan pengenalan tersebut memberikan sebuah ‘kesadaran’ dan ritualitas (berjabat tangan) merupakan bentuk pengenalan ideologi yang menjadikan, bahwa kita adalah subjek-subjek yang kongkrit. Namun paradok berikutnya adalah ideologi tersebut bersifat eksternal, sehingga Louis Althusser mengatakan bahwa kenyataanya individu itu bersifat Abstrak

“ Jadi ideologi, memanggil dan menginterpelasi individu-individu sebagai subjek, karena ideologi bersifat eksternal... yang seyogyanya membawa kita pada suatu pernyataan terakhir; individu-individu adalah subjek yang menyudah (*individual are always- already subject*) karenanya individu bersifat ‘abstrak’ karena berkenaan dengan subjek-subjek yang selalu menyudah”<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Althusser, Louis, *Tentang Ideologi... Log Cit* hal 52

<sup>143</sup> Ibid hal 60

<sup>144</sup> Ibid hal 53

## B. Otonomi Relatif

Pemikiran Louis Althusser tentang otonomi relatif ini merupakan penolakannya dia terhadap tradisi Marxist ekonomisme atau sebuah pandangan yang mengatakan bahwa hubungan-hubungan sosial hanya mencerminkan proses-proses ekonomi, maka dalam pandangan ini ekonomi, menentukan segala-galanya.

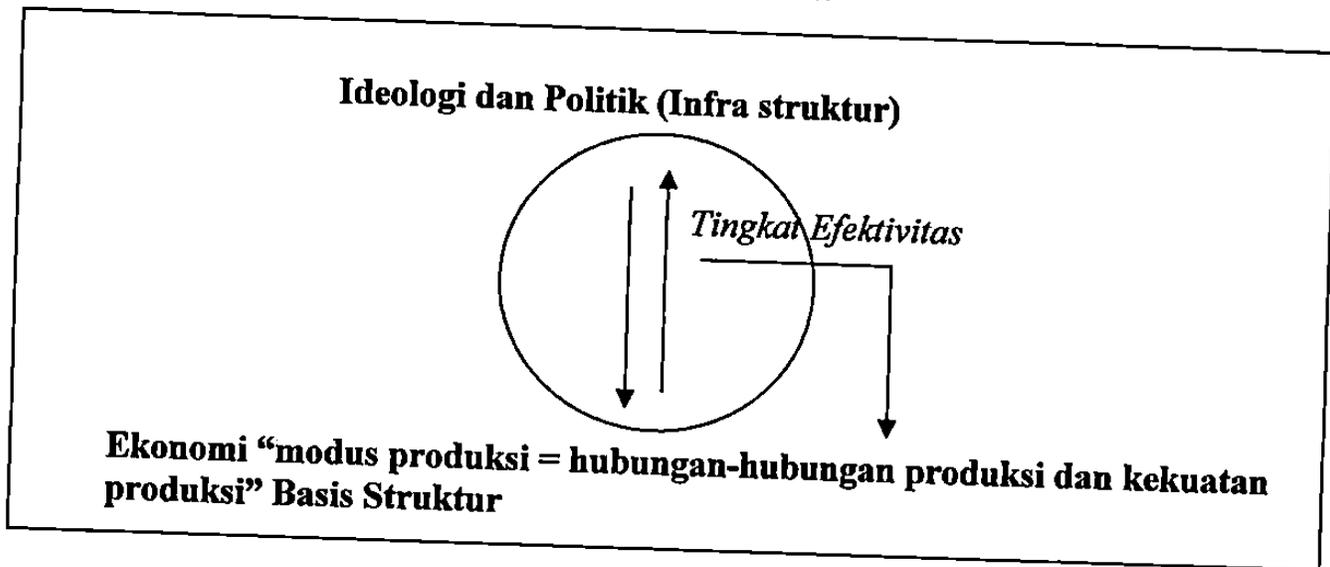
Dalam kajian diatas tersebut, memang berkaitan dengan konsepsi materialisme historis Marx, dimana totalitas dalam perubahan struktur sosial sejarah mengandung unsur *determinisme*, perkembangan sejarah tersebut harus dianalisa dalam suatu keseluruhan komplek menurut berbagai aspeknya, aspek ekonomi (mode produksi, artinya kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi) yang disebut sebagai *basis struktur*, aspek politis (perjuangan kelas), aspek yuridis dan aspek ideologis atau nanti yang disebut sebagai *supra struktur*. Dan syarat-syarat material yaitu produksi dan reproduksi (bidang ekonomi) inti seluruh analisa.

Dan inti bangunan basis struktur dan infra struktur dalam kajian materialisme historis yang dibangun oleh Marx, dari ini maka tergambarlah karakter penentu yang paling menentukan ( *determination in the last instance* ) yang dimiliki oleh basis, dan efek spasial ini dapat diamati dalam *tingkatan efektifitas (Index of ektifity)*. Karena efektifitas yang paling menentukan ini 'lantai-lantai' supra struktur memiliki tingkatan efektifitas yang berbeda-beda, Sehingga lantai supra struktur tidak ditentukan secara pasti oleh basis, melainkan oleh efektifitas basis.<sup>145</sup>

<sup>145</sup> Althusser, Louis, *Essays on Ideology*, London, 1971, hal. 170.

Maka bagi Louis Althusser, struktur *politik* dan *ideologis* masyarakat tidak boleh dianggap *hanya* mencerminkan proses-proses ekonomis, struktur politik dan ideologi mempunyai suatu *otonomi relatif*. Bisa terjadi, dalam proses ekonomis sebagian ditentukan juga oleh politik dan ideologi. Dan hal ini harus dilihat dari hubungan-hubungan produksi, dan Althusser mengiterpelasikanya dengan contoh, dia memeperlihatkan pada Abad Pertengahan ideologi religius lebih kuat daripada ekonomi, tetapi keadaan itu diperlukan supaya hubungan-hubungan feodal dapat berfungsi dengan baik.<sup>146</sup>

Bagan 1. Determisme Infra-Struktur dan Basis Struktur.



### C. Teori Negara Marxist

Negara dalam tradisi Marxian adalah fenomena masyarakat berkelas, ada dan tidak adanya negara, yang terbentuk dari perilaku dominasi serta penindasan terhadap suatu kelas yang termanifestasi dalam kontradiksi kelas. Kontradiksi kelas merupakan

kekuatan kelas yang refresif . Negara sebagai organisasi teroganisir dan kuat acap kali digunakan sebagai alat penaklukkan kelas. Seperti yang dikatakan F. Engels dalam , *The Origin of the Family, Private Property and the State* (“Asal-Usul Keluarga, Milik Perseorangan, dan Negara”) menyatakan ;

“Negara, dengan demikian, adalah sama sekali bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit ‘realitas ide moral’, ‘bayangan dan realitas akal’ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam ‘batas-batas tata tertib’; dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara (hlm. 177-178, edisi bahasa Jerman yang ke-enam).<sup>147</sup>

Kekerasan dan dominasi serta wujud penindasan terhadap kelas akan menjadi tata nilai dan faham ditingkatan masyarakat suatu kelas baik yang mendominasi maupun yang didominasi, dikarenakan segala instrument kelas seperti lembaga pendidikan, majelis agama, kekuatan militer sebagai pendukung jalan memanipulasi suatu kesadaran kelas. Dengan ini Negara dan rezim akan selalu berada pada posisi dominasi kelas.

Banyak kenyataan dapat kita saksikan dalam realitas masyarakat kelas, alat bersenjata dan lainnya tersebut yang dikuasai oleh Negara sangat jelas alur

---

<sup>147</sup>Lenin, *Negara dan Revolusi*, Sumber;

<http://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1917/negara/state1.htm> diakses pada tanggal 15 Januari

keberpihakannya, tidak tanggung – tanggung produksi manipulasi kesadaran serta produksi kekerasan merajalelah ditingkat massa rakyat. Terutama dilakukan oleh alat bersejata, kerana alat ini lebih memudahkan untuk melakukan penguasaan sumber – sumber produksi kelas, harus dicatat bahwa penggunaan alat kekerasan akan mempercepat berebutan dan penguasaan sumber produksi pada kelas tertindas. Seperti juga yang dikatakan Engel;

”Ciri kedua yang membedakan ialah ditegakkannya kekuasaan kemasyarakatan yang sudah tidak sesuai secara langsung dengan penduduk yang mengorganisasi diri sebagai kekuatan bersenjata. Kekuatan kemasyarakatan yang khusus ini perlu, karena organisasi bersenjata yang bertindak sendiri dari penduduk menjadi tidak mungkin sejak terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas... Kekuasaan kemasyarakatan ini ada di dalam setiap negara. Ia tidak hanya terdiri dari orang-orang bersenjata saja, tetapi juga terdiri dari embel-embel materiil, yaitu penjara dan segala macam lembaga pemaksa, yang tidak dikenal oleh susunan masyarakat gens (klan)  
...<sup>148</sup>

Engel diatas menjelaskan bahwa, Negara dengan konsepsi “kekuatan” dimana kekuatan itu mencul dari masyarakat, dan pada akhirnya kekuatan tersebut mengasingkan diri dari masyarakat, dan menjadi kekuatan kelas yang mempunyai patronase terhadap kelas pemilik kapital atau kelas borjuasi, dan Negara pada akhirnya dengan keberdaan kesatuan orang-orang bersenjata menjadi kekuatan yang mengasingkan dirinya kepada masyarakat dengan menggunakan sifatnya yang utama yaitu ‘represif’.

<sup>148</sup> Lenin, *Negara dan Revolusi*, Sumber;  
<http://www...>

Menurut Louis Althusser, manifestasi keberadaan Negara ada pada *Aparatus negara-nya*, dimana Aparatus Negara-lah yang menentukan Negara sebagai sebuah kekuatan pelaksana dan intervensi yang bersifat represif demi kepentingan-kepentingan kelas yang berkuasa dalam proses perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelas yang berkuasa. Dalam proses perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelas borjuasi dan sekutu-sekutunya melawan kelas proletariat. Aparatus Negara dalam hal ini bukan hanya kekuatan yang terspesialisasi dalam kerja yang mengharuskan eksistensi dalam menjaga relasi-relasi kapital yang terbentuk, seperti polisi, pengadilan, penjara, tentara, namun di atas semua itu juga ada kepala negara, pemerintah dan birokrasi.<sup>149</sup> Namun Louis Althusser melihat kompleksitas dalam kajian Negara dalam tradisi Marxian yang pada dasarnya masih bersifat deskriptif tidak akan bisa dipahami tanpa ada tatanan teoritis yang lebih lanjut tentang konsepsi Negara, maka Louis Althusser menambahkan eksistensi Negara bukan hanya direduksi dalam sifatnya yang represif tapi juga dalam wilayah yang berada dalam aras ideologi. dan Louis Althusser menamakannya sebagai Aparatus Ideologi Negara (AIN).

#### **D. Aparatus Ideologis Negara**

Aparatus Represif Negara pada dasarnya menjalankan fungsi Negara dengan “kekerasan” dimana Aparatus Negara tersebut terdiri dari kekuatan-kekuatan Negara yang menjalankansifatnay yang represif baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Misalkan kekuatan yang mengambil kekerasan dalam wilayah fisik adalah polisi,

<sup>149</sup> Althusser, Louis. *Essays on Ideology*. London: Verso, 1984.

militer, penjara dan aparatus bersenjata lainnya, sedangkan Aparatus represif yang berada dalam wilayah non fisik, biasanya bekerja dalam represif administratif misalkan seperti birokrasi negara.

Louis Althusser menegaskan, bahwa Aparatus Ideologis Negara disini, tidak bisa dipertukarkan dengan Aparatus Represif Negara, dan perbedaan tersebut, *pertama*; sementara terdapat satu aparatus (represif) Negara dan terdapat pluralitas dalam Aparatus Ideologis, meskipun ada kesatuan yang menyatakan *pluralitas* pada Aparatus Ideologis Negara sebagai sebuah badan, maka tidak merupakan hal yang serta merta dapat terejawantahkan dengan begitu saja. *Kedua*; Aparatus Represif Negara bersatu sepenuhnya pada wewenang *publik*, sebaliknya peran Aparatus Ideologis Negara (dalam penyebaran nyata) yang lebih luas, kebanyakan merupakan wewenang *privat*.<sup>150</sup> Dan Aparatus Ideologis Negara (AIN) tersebut sebagai berikut,<sup>151</sup>

- AIN Keagamaan
- AIN Pendidikan (sistem pendidikan sekolah baik negeri maupun swasta dan lain-lain)
- AIN Keluarga
- AIN Hukum<sup>152</sup>
- AIN Politik (sistem politik, maupun partai-partai politik yang beragam)
- AIN Komunikasi (pers, radio, televisi, media masa lainnya)
- AIN Kebudayaan (Kesusatraan, seni, dan sebagainya)

<sup>150</sup> Althusser, Louis. *Tentang Ideologi*, Jalasutra, Yogyakarta, 2006 hal 20

<sup>151</sup> Ibid

<sup>152</sup> Hukum bisa termasuk dalam Aparatus Represif Negara (AIN)

Namun bagi Louis Althusser selain perbedaan diatas tersebut ada perbedaan yang esensial diantara keduanya adalah; Aparatus represif negara menjalankan fungsinya dengan 'kekerasan' sementara Aparatus Ideologis Negara menjalankan fungsinya dengan ideologis.<sup>153</sup>

Tabel.1.Perbedaan Aparatus Ideologis Negara dengan Apratus Represif Negara

No.	Aparatus Represif Negara	Aparatus Iderologis Negara
1	Terdapat Satu Aparatus Negara	Terdapat Pluralitas dalam Apartus Ideologis
2	Bersatu pada satu wewnang Publik	Kebanyakan berada dalam ruang Privat
3	Bekerja dengan kekerasan	Bekerja dengan fungsi ideologi

### E. Sistematika Kerja Ideologi

Bagi Louis Althusser semua ideologi itu mengarah ke pusat, atau kepada Subjek yang besar ( S besar membedakan dari subjek-subjek), misalkan dalam bidang ideologi Negara, 'S' besar ini adalah Negara, subjek tersebut mengeksitensikan dirinya sebagai subjek melalui Subjek. Sebelumnya ideologi-ideologi yang dibentuk Subjek mengubah individu-individu menjadi subjek-subjek. Ideologi memberikan sebuah identitas personal pada subjek-subjek untuk mengubah individu-individu tersebut. Dan pembentukan identitas personal tersebut, adalah berupa bentuk pengakuan dalam diri subjek-subjek bahwa dia merupakan bagian dari struktur Subjek. Sehingga proses indentifikasi ini merupakan hal yang alamiah dalam prosesnya.

<sup>153</sup> Althusser, Louis. *Tantangan Ideologi*. On Cit'hal 21

Subjek tersebut mengejawantahkan dirinya dalam realitas kehidupan material subjek-subjek, sebagai sebuah legalitas yang menguatkan keberadaan Subjek dan pengukuhan terhadap dirinya kepada subjek-subjek yang Subjek. Penejawantahan Subjek tersebut dalam bentuk Aparatus ideologis, yang memberikan sebuah ritual-ritual yang akan mejadikan subjek-subjek pada jalan yang merupakan tuntunan dari Subjek (Negara).

Ideologi yang menyebut individu-individu sebagai subjek-subjek dengan mengatasnamakan Subjek, dan Subjek tersebut bersifat *memantulkan (speculary)* atau berstruktural cermin, dan memantulkan *secara berganda (double specular)*; jadi cermin ini membentuk ideologi dan menjamin berfungsinya ideologi tersebut. inilah yang merupakan bentuk pengarah *ideologi itu menuju ke pusat*, serta Subjek yang menempatkan dirinya di pusat dan diseperti pusat itulah, Subjek menginterpelasi individu disekitarnya untuk menjelma menjadi subjek-subjek dalam konektivitas cermin ganda, sehingga tercipta *ketertundukan* subjek-subjek kepada Subjek. Di dalam Subjek, subjek-subjek dapat merenungkan citra mereka sendiri dan memperoleh *jaminan* bahwa semua yang terkait dengan realitas yang ada dalam subjek-subjek merupakan bentuk keterhubungan dirinya dengan Subjek. Subjek-lah menempatkan Dirinya pada kekuatan yang menguasai sepenuhnya keberadaan subjek-subjek, subjek-subjek yang

menciptakan pengakuan (recognition) pada subjek-subjek dengan mengetahui eksistensi keberadaannya dalam Subjek.<sup>154</sup>

Maka dengan penjabaran diatas membentuk posisi yang disebut sebagai lajur yang telah di rancang oleh ideologi tersebut, dalam kehidupan subjek-subjek. Akhirnya terbentuklah sebuah posisi baku. Inilah aku, seorang buruh, petani, maupun seorang kapitalis. Dengan ini kepatuhan terhadap Subjek adalah sebuah pembenaran, dan ketidakpatuhan adalah merupakan sebuah bentuk penyimpangan atau kesalahan.

Singkatnya, struktur duplikasi berganda dari ideologi secara berbarengan menjamin;<sup>155</sup>

1. Pemanggilan 'individu-individu' sebagai subyek-subyek
2. Ketertundukan mereka pada Subjek
3. Saling pengenalan antara subyek-subyek dengan Subyek, saling pengenalan antar subyek dan akhirnya pengenalan subyek akan dirinya sendiri
4. Jaminan mutlak bahwa segalanya memang berlangsung demikian, dan bahwa, dengan syarat bahwa subjek mengenal siapa mereka, dan bersikap selaras dengannya, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik.

Sebagai subjek-subjek yang bekerja dengan sendirinya dengan ketertundukannya pada Negara, merupakan subjek-subjek yang bekerja dalam ruang lingkup ideologis

---

<sup>154</sup> Ibid hal 59.

<sup>155</sup> Ibid hal 58

yang bentuk konkretnya sudah terejawantahkan dalam Aparatus Ideologis Negara, subjek-subjek tersebut telah tersusupi oleh ritual-ritual yang sudah menjadiketentuan dari Aparatus Ideologis Negara, sehingga mereka mengakui keadaan yang sudah terlingkupi nilai-nilai yang sudah dibentuk oleh ritual-ritual Aparatus Ideologis Negara merupakan keadaan yang ada sebagaimana mestinya, sehingga mereka harus patuh pada ketentuan yang ada dalam Negara . Dan yang tidak menjalankan ketentuan dari Negara akan mendapatkan lebelitas sosial sebagai manusia yang menyimpang atau jahat dan menjadi hal yang wajar apabila subjek tersebut mendapatkan '*represifitas negara*' yang dilakukan oleh Aparatus Represif Negara.

#### **F. Corak Kerja Aparatus Ideologi Negara Dalam Rezim Orde Baru.**

Politik Revolusi Soekarno yang terangkum dalam Manipol dan USDEK, dengan semboyan "Revolusi Belum Selesai" ternyata menimbulkan begitu banyak pertentangan ideologis maupun politik yang pada akhirnya mengganggu kestabilan struktur pemerintahan dengan banyaknya konflik yang ada. Orde Baru belajar dari konflik sosial politik terpimpin Soekarno, sehingga meninggalkan ajaran ideologis "Revolusi Belum Selesai" dan mengembalikan integritasi Indonesia pada ekonomi global kapitalisme, dengan memutus ekonomi Berdikari yang dibangun Soekarno dan memberikan seluas-luasnya pada pemilik modal untuk mengakumulasi modalnya di Indonesia dengan cara menerapkan sistem Developmentisme ekonomi yang...

1967 Pemerintahan Militer Indonesia Soeharto menerapkan teori pembangunan.<sup>156</sup> Dan ini menjadi program berkala yang berjangka lima tahun yang dikenal dengan REPELITA yang bertumpu pada ideologi dan teori modernisasi. Pembangunan asal mulanya merupakan sebuah teori dan berkembang menjadi Ideologi.<sup>157</sup>

Developmentisme sebagai ideologi taraf utama keberhasilnya harus didukung kestabilan politik, dan dalam menjalankan fungsi ini rezim Orde Baru menggunakan kekuasaannya dengan format militer. Ideologi militer (militerisme), Militerisme erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Militerisme berarti pula merasuknya nilai-nilai, sikap, dan perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi, disiplin, pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya.

Watak militersistik ini yang merupakan identifikasi kekuasaan Otoritariat Totaliterisme pemerintahan Soeharto. Totaliterisme ini merupakan,<sup>158</sup> suatu ideologi resmi yang dianut oleh semua anggota masyarakat dan meliputi semua segi kehidupan dimana semua aktivitas politik maupun sosial terkontrol oleh kepentingan ideologi. Dan ini bagi Louis Althusser semua ideologi itu mengarah ke pusat, atau kepada Subjek yang besar (Soeharto) sebagai kekuatan politik utama Ideologi Pembangunan.

Dibawah sistem Totaliterisme Ideologi membentuk Identitas sosial yang merupakan bentuk represi ideologi pembangunan yaitu mengidentifikasi masyarakat menjadi manusia-manusia mesin, manusia yang dinetralisirkan dari kepentingan

<sup>156</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006 hal 57

<sup>157</sup> [http://melampaiipemilu.com/developmentalisme-m-dawam-rahardjo/diakses pada 7 maret 2010](http://melampaiipemilu.com/developmentalisme-m-dawam-rahardjo/diakses%20pada%207%20maret%202010)

<sup>158</sup> *Redes, Galt, G. ...*

ideologi kecuali satu-satunya ideologi yaitu ideologi pembangunan, manusia dijadikan komponen-komponen pembangunan yang didalamnya terjadi berbagai penyeragaman, standarisasi dan pembatasan-pembatasan.<sup>159</sup> Identitas sosial tersebut misalkan seperti “Antikomunis”.

Pada awal pemerintahannya Orde Baru mengeluarkan TAP MPRS No. 25 tahun 1966 yaitu sebuah peraturan pelarangan ideologi Marxisme-Leninisme dengan memberikan stigma kepada masyarakat bahwa Marxisme-Leninisme merupakan ideologi yang tidak mempercayai Tuhan dan bahkan ideologi yang akan mengancam Nasionalisme, dan bertentangan dengan ideologi Pancasila, menurut M Dawam Raharjo<sup>160</sup> Motif utama dari Ideologi Pembangunan adalah membendung pengaruh komunisme di Negara dunia ketiga yang cenderung memilih bentuk lain sosialisme sehingga Kontruksi Identitas yang terbangun dimasyarakat. Bentuk tindakan apapun yang identik dengan Komunisme harus di lawan karena bertentangan dengan Pancasila kepentingan Negara.

Keberhasilan Ideologi Pembangunan menciptakan pengakuan (*recgeneration*) pada masyarakat merupakan bentuk refleksi eksistensi masyarakat di dalam kepentingan Negara. Yang pada dasarnya *recgenation* tersebut merupakan lajur yang sudah dirancang oleh ideologi sehingga tercipta posisi baku.inilah aku seorang yang “Anti Komunis” hal ini tersebut merupakan bentuk bahwa pengakuan tersebut timbul karena masyarakat yang telah disusupi oleh ritual-ritual yang dilakukan oleh Aparatus Ideologi

---

<sup>159</sup> Amir, Yasraf Piliang, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Tiga Serangkai, Solo 2003 hal 180

<sup>160</sup> <http://malampeni.com>

Negara (AIN). Misalkan ritualitas yang dilakukan oleh AIN Media, seperti yang ditayangkannya film “Penghianatan G30S/PKI” setiap tanggal 1 oktober pada hari Kesaktian Pancasila yaitu tentang pemberontakan G 30 S PKI, dimana PKI adalah aktor penculikan delapan Jenderal dan dan film tersebut menjadikan tokoh Soeharto sebagai Pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan tersebut, juga Ritualitas dari AIN Pendidikan, yaitu dengan membentuk kurikulum sejarah yang mendeskreditkan PKI, dan masih banyak yang lainnya.

Menurut Baskara T Wardaya, penyusunan sejarah Indonesia pada jaman Orde Baru adalah upaya untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan. Dimana menurut penuturan resmi Orde Baru apa yang terjadi pada era 1965-1966 adalah melulu masalah penumpasan PKI sebagai ancaman terbesar dari Negara. Tidak kurang, tidak lebih. Dikatakan bahwa PKI adalah Partai atheis yang merupakan dalang utama yang membunuh para pemimpin Angkatan Darat Republik Indonesia, pada 1 Oktober 1965. Itulah sebabnya menurut versi ini G 30S harus selalu disertai dengan tanda garis miring dan “PKI”. Pembuatan serta kewajiban menonton film G30S/PKI adalah contoh kongkret bagaimana Orde Baru mengesahkan versi tentang sejarah Indonesia pada masyarakat.<sup>161</sup>

Berkat keberhasilan penguasaan Aparatus Ideologis Negara (AIN) di masyarakat, mengenai pengaruh resmi kerangka sejarah yang dibentuk oleh Orde Baru terhadap peristiwa 1965-1966. Maka terbentuklah pengakuan di masyarakat bahwa PKI dinyatakan bersalah dan selayaknya serta semaksimal mungkin anggota dari partai

<sup>161</sup> Wardaya T. Baskara, *...*

tersebut dibunuh diluar hukum-hukum prinsip kemanusiaan, karena PKI telah dianggap membunuh para Jenderal sebagai sebuah tindakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Dan pembantaian terhadap setengah juta jiwa lebih penduduk yang dituduh PKI oleh rezim Orde Baru adalah tindakan yang sah. Begitu pula pemenjaraan serta penindasan terhadap jutaan orang lainnya setelah itu.<sup>162</sup> Lebih lagi masyarakat yang yang dituduh memiliki keterkaitan dengan PKI harus kehilangan haknya sebagai warga negara yang se-utuhnya. Ketika pada tahun 1979 para tawanan yang diruduh mempunyai keterkaitan dengan PKI yang dipenjarakan dibebaskan msih mempenjarakan mereka dengan praktek-praktek diskriminasi dan stigmanisasi. Pembuatan kode "ET" (eks Tapol) kepada para bekas tahanan Orde Baru dan ini merupakan sebuah contoh pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dimaksudkan untuk mempersulit ruang gerak mereka karena dianggap sebagai ancaman Negara.<sup>163</sup>

Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah; apakah Aparatus Represif Negara, dalam menjalankan fungsinya benar-benar menggunakan kekerasan atau sebalikinya, Aparatus Ideologis Negara menjalankan fungsinya benar-benar bersifat ideologis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kedua aparaturnya tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu merupakan alat bagi kepentingan kelas berkuasa melalui Negara. dan Louis Althusser memberikan penjabaran tentang hal ini;

<sup>162</sup> Mengenai peristiwa pembantaian tersebut dapat dilihat dari tiga penyelidikan yang dilakukan oleh wartawan, pertama; Stanley Karnow dari Whashington Post, setelah melalui perjalanan 2 pekan di seluruh Jawa dan Bali setengah juta orang telah dibunuh. Kedua; Seth King dari New York Times, mengajukan angka perkiraan moderat sebanyak 300.000 korban tewas, ketiga; Seymour Topping rekan Seth King di koran yang sama, setelah melakukan penyelidikan beberapa bulan kemudian dan menyimpulkan bahwa jumlah koeban meninggal seluruhnya melebihi setengah juta jiwa dan ketiga responden asing tersebut memberitakan bahwa personil militer dan dan milisi sipil antikomunis terlibat dalam pembunuhan dan sering kali melakukan dengan cara sistemik dan rahasia. Selengkapnya lihat.. Rossa John, Dalil Pembunuhan Massal, *Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*, Hasta M...

<sup>163</sup> Warda, T. P. ...

“Saya bisa semakin menjernihkan hal ini dengan mengoreksi perbedaan tersebut, saya lebih suka mengatakan bahwa setiap Aparatus Negara, entah itu yang represif maupun yang Ideologis, ‘menjalankan fungsinya’- nya baik dengan kekerasan maupun dengan ideologis, namun dengan satu perbedaan yang sangat penting yang mengharuskan kita tidak merancukan Aparatus Ideologis Negara dengan Aparatus Represif Negara.”<sup>164</sup>

Dengan pernyataan yang diajukan oleh Louis Althusser diatas pada dasarnya tidak ada Aparatus Represif Negara yang sepenuhnya dalam menjalankan fungsinya dengan kekerasan, sementara dia juga menjalankan fungsinya secara ideologis secara sekunder, dan juga tidak sepenuhnya Apratus Ideologis Negara menjalankan fungsinya dengan menggunakan ideologi, tapi juga dalam prakteknya dia juga menggunakan *kekerasan* secara sekunder.

Misalkan Aparatus Represif Negara, seperti Militer dan Polisi, dalam mempertahankan sifat represifitasnya, kekuatan-kekuatan tersebut harus menanamkan kekuatan Ideologis, seperti misalkan dalam sistem pemerintahan ‘Orde Baru’ mereka mewajibkan penataran P4 ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila) pada setiap instansi pendidikan yang pada dasarnya P4 tadi adalah penanaman ideologi militeristik<sup>165</sup>. Ideologi tersebut berfungsi untuk menjamin kohesi gerak dari reproduksi represifitas militer itu sendiri.

Dan, mengenai fungsi ideologi dalam Aparatus Ideologi Negara, dalam mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam tatanan ideologis tersebut, Aparatus Ideologis Negara juga menggunakan kekerasan, namun represifitas yang dilakukan secara

<sup>164</sup> Althusser, Louis . *Filsafat sebagai Senjata Revolusi* ; Resist Book, Yogyakarta 2007 hal 169

<sup>165</sup> <http://www.kemahasiswaan.go.id>

diam-diam atau bahkan secara simbolik, misalkan sekolah-sekolah tersebut menerapkan metode penghukuman yang bersifat fisik sekalipun agar tatanan nilai yang sudah ada dalam Ideologis tersebut terpatuhi.

Dan represifitas dalam pendidikan juga dapat dilihat dari proses praktek pembelajaran, dimana dalam praktek sistem pengajarannya lebih bersifat komandois yang merupakan salah satu watak militer, yaitu pembelajaran lebih bersifat satu arah, kekuasaan mutlak ada pada pendidik, seperti yang diandaikan oleh Paulo Feire hal tersebut seperti sistem pendidikan diandaikan sebagai sebuah “Bank” (banking concept education) dimana pelajar diberi ilmu pengetahuan agar ia kelak mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Jadi, anak didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditas ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Depositor atau investornya adalah para guru yang mewakili lembaga kemasyarakatan mapan dan berkuasa, sementara depositonya adalah berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak didik. Anak didik pun lantas diperlakukan sebagai “bejana kosong” yang akan di didik sebagai sarana tabungan atau penanaman “modal ilmu pengetahuan” yang akan dipetik hasilnya kelak. Jadi guru adalah subyek *aktif*, sedangkan anak didik adalah obyek pasif yang *penurut*, dan diperlakukan tidak berbeda atau menjadi dari realitas duniya yang diajarkan pada mereka, sebagai obyek ilmu pengetahuan teoritis yang tidak berkesadaran.<sup>166</sup>

Dalam penyelidikan lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya peran ideologi menurut Louis Althusser khususnya dalam perangkat Aparatus Negara tidak bisa

dilepaskan dari bagaimana pandangan Louis Althusser mengenai Marx karena Louis Althusser dalam sebagai seorang pemikir Marxian tujuan teoritisnya ingin mengembalikan ajaran esensial Marx. .

### **G. Pemikiran Louis Althusser Tentang Marx**

Louis Althusser memandang pemikiran Marx ditandai dengan diskontinuitas.<sup>167</sup>

Louis Althusser memberikan penjelasan dalam menggambarkan teori Marx sangat berbeda dengan pemikir Prancis pada waktu itu, dimana para Pemikir Prancis tentang Marx yang bahkan di dalam Partai Komunis Prancis sendiri menurut Louis Althusser berada dalam kevakuman teoritis tentang Marx ini dapat dilihat dari pernyataan Louis Althusser dalam karyanya *For Marx* sebagai berikut;

“The French Party was born into this theoretical vacuum,... Marxism should not be simply a political doctrine, a ‘method’ of analysis and action, but also, over and above the rest, the *theoretical domain of a fundamental investigation*, indispensable not only to the development of the science of society and of the various ‘human sciences’, but also to that of the natural sciences and philosophy. It was the fate of the French Party to be born and to grow up in these conditions: without the heritage and assistance of a national *theoretical* tradition, and as an inevitable consequence, without a theoretical school which could produce masters”<sup>168</sup>

“Partai Prancis lahir atas dasar kevakuman teori ini...bahwa Marxisme tidak boleh sekadar doktrin politik, sebuah ‘metode’ analisis dan tindakan, tetapi juga, di atas dan di samping itu, teoretis domain atas penyelidikan mendasar, sangat diperlukan bukan hanya untuk pengembangan ilmu masyarakat dan dari berbagai ‘human sciences’, tetapi juga bahwa ilmu-ilmu alam dan filsafat. Itu adalah nasib Partai Perancis untuk dilahirkan dan berkembang dalam kondisi ini: tanpa warisan dan bantuan dari tradisi teoretis nasional, dan sebagai konsekuensi tak terelakkan, tanpa sekolah teoretis yang dapat menghasilkan master”

---

<sup>167</sup> Purnomo, Sidik, *Interpretasi Louis Althusser Terhadap Pemikiran Karl Marx*; UGM Yogyakarta 1993 (Skripsi) hal 99

<sup>168</sup> Althusser, Louis. *For Marx*, sumber;

<http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1965/introduction.htm> diakses 15 Januari 2010

Dengan menggunakan metode seorang filsuf ilmu Prancis Gaston Bechelard, metode yang dikenal dengan *Coupure epistemologique* ini Louis Althusser kembali membaca Marx dari sudut yang berbeda dengan dominasi pemikir Marxian Prancis yang begitu Hegelian, *Coupure epistemologique* adalah kata yang berasal dari bahasa Prancis, secara etimologi kata *Coupure* adalah benda feminis yang berarti pemutusan aliran, retak dan kata epistemologique tersebut dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris epistemologic repute atau sering juga disebut sebagai epistemologic break dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai, keterpisahan epistemologi.<sup>169</sup>

Konsep *Coupure Epistemologique* ini memandang dalam penentuan kebenaran norma pengetahuan harus disandarkan pada transhistoris. Keberadaan sebuah ilmu tidak dijabarkan dalam bentuk logis dan berfilosofis tapi lebih pada realitas pokok permasalahan pada saat tertentu dalam ruang lingkup perkembangan historis yang mendasarinya. Sehingga norma-norma kebenaran ilmu pengetahuan tidak berada di luar ilmu itu sendiri atau ucapan-ucapan ilmiah itu tidak datang dari luar, melainkan ilmu itu menciptakan aturan-aturannya sendiri serta yang berlaku untuk menyusun dan mengecek teori-teorinya, maka pengetahuan bersifat historis dan regional, sehingga dilihat dari sudut pandang historis dan regional maka ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kajian ilmiah mempunyai sifat diskontinuitas. sejarah ilmu pengetahuan adalah sejarah yang menciptakan ilmu dalam proses pembaruan yang terus-menerus. Bechelard mencontohkan kita tidak akan menemukan mekanika gerak Einstein dengan melihat

---

<sup>169</sup> Purnomo, Sidik. *Interpelasi pemikiran.. OpCit* hal 99

kembali hukum mekanika gerak yang di jabarkan oleh Newton.<sup>170</sup> Dengan *Coupure Epistimelogique* Louis Althusser melihat keterpisahan pemikiran Marx dalam beberapa dekade sebagai berikut;<sup>171</sup>

Periode pertama; Liberal-rasionalis pada saat *Rheinische Zeitung* (1842) ; Pemikiran Marx dalam pandangan Louis Althusser dalam tahap awal ini lebih kepada penolakan terhadap rezim absolutisme German dan Negara Prancis Modern yang dimana kebebasan hanya dikonsepsikan dalam hukum yang bersifat formal. Karena manusia pada takdirnya adalah mahluk yang berkebebasan, Konsepsi kebebasan yang ditorehkan oleh Marx lebih didominasi oleh konsepsi kebebasan yang rasional dalam pandangan Kant dan Fichte dari pada pemikiran Hegel. Dengan kebebasan yang ada manusia merupakan produsen utama pembentuk sejarah.<sup>172</sup> Kebebasan yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk dari sebuah kewajaran yang berkesesuaian dengan manusia sebagai produk alamiah. Kewajaran yang bersifat alamiah tersebut merupakan realita yang tidak bisa dimunafikan, kebebasan yang ada bukanlah sesuatu yang abstrak atau sebagai sebuah ketentuan dari sebuah hukum. Tapi kebebasan itu ada secara otomatis atau imanen dalam diri manusia. Kebebasan tersebut ada dalam semua perkembangan sejarah dalam bentuk yang berbeda-beda;

---

<sup>170</sup> Bertens, Kess. *Filsafat Barat Abad XX; Prancis Jilid II*; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996. Hal 375

<sup>171</sup> Louis, Althusser. *For Marx* sumber;

<http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1965/introduction.htm> diakses 15 januari 2010

<sup>172</sup> Louis Althusser. *For Marx*, sumber;

<http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1965/introduction.htm>

“feudalism is freedom, but in the ‘non-rational’ form of privilege; the modern State is freedom, but in the rational form of a universal right”<sup>173</sup>

“feodalisme adalah kebebasan, tapi dalam non-rasional, bentuk hak istimewa Negara modern adalah kebebasan, tetapi dalam bentuk rasional hak universal.”

Maka dalam realitas pencerahan sebagai pembentuk moderisasi dalam dunia kefilosafatan yang lebih menekankan rasionalitas sebagai rajutan utama dalam membahas mekanisme pembentukan struktural politik menjadi sebuah ketentuan yang harus diterima dengan keberadaan akal bahwa keberadaan Negara merupakan sebuah instrumental yang menjaga eksistensi kebebasan karena Negara merupakan produk hukum alamiah akal. Sehingga Negara merupakan penepatan hukum terorganisasi yang harus menemukan kebebasan berpolitik dalam setiap individual penduduknya.

“Philosophy regards the State as the great organism in which legal, moral and political freedom should find their realization and in which the individual citizen”<sup>174</sup>

“Filsafat menganggap Negara sebagai organisme besar di mana hukum, moral dan kebebasan politik harus menemukan realisasi dan di mana individu warga negara”

Tahap Kedua (1842-1845) didominasi oleh bentuk baru humanisme : *Feuerbach's 'komunalis' humanisme*. Ketika kegagalan reformasi yang dilakukan oleh sistem absolutisme Prusia, terjadi sebuah proses penyimpangan dari maksud sebenarnya. Dimana dalam tahapan ini Marx menolak rasionalisme sebelumnya. Proses

rasionalitas dengan ketidakrasionalan ; dan konflik ini merupakan dasar dari filsafat Feurbach.<sup>175</sup> Sejarah adalah bentuk keterasingan dikarenakan irasionalitas berfikir yang menghilangkan esensial objektivisme manusia dimana manusia dianggap sebagai makhluk yang tidak berkebabasan karena telah teralinasi oleh agama. Negara serta komoditas sebagai faktor yang menguasai pola pikir manusia. Sehingga dalam tahap ini manusia adalah manusia abstrak dengan hilangnya eksistensinya

Dalam kedua tahap tersebut, Marx memberikan kesan pada teorinya bahwa manusia merupakan dasar atas tindakan politik atau *politik praktis representation*, Politik tidak lagi, hanya berada dalam tatanan teoritis kritis misalkan dilihat dalam kebebasan pers. Tetapi pada esensialnya manusia sebagai *representation* politik praktis, namun dalam bingkai Negara. Manusia kehilangan eksistensinya karena berada dalam ruang imajinasi sendiri yang diciptakan oleh Negara. Dengan cara menghilangkan hak-haknya. Maka Revolusi bukan sekedar dalam bentuk politik (*rational liberal reform of the State*) tetapi juga manusia (*Communist*). Jika manusia ingin kembali pada esensial sifatnya , sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk bebas.

Tahap Ketiga; adalah priode mulai tahun 1845 dan sesudahnya; pada tahun tersebut tersebut Marx mengalami keterpisahan epistimologi dengan pemikir sebelumnya, dengan memutuskan secara radikal setiap teori dan sejarah yang didasarkan pada hakikat manusia. Dan keterpisahan tersebut mengandung tiga unsur;

“This unique rupture contained three indissociable elements. (1) The formation of a theory of history and politics based on radically new

concepts: the concepts of social formation, productive forces, relations of production, superstructure, ideologies, determination in the last instance by the economy, specific determination of the other levels, etc. (2) A radical critique of the *theoretical* pretensions of every philosophical humanism. (3) The definition of humanism as an *ideology*.”<sup>176</sup>

“Keterpisahan yang unik ini berisi tiga hal (1) Pembentukan teori sejarah dan politik berdasarkan konsep-konsep baru yang radikal: konsep pembentukan sosial, kekuatan-kekuatan produksi, hubungan-hubungan produksi, superstruktur, penentuan ideology oleh ekonomi pada struktur dasarnya, deteminasi khusus pada strata yang lain(2) Sebuah kritik radikal dari pretensi teoretis setiap filosofis humanisme. (3) Yang dimaksud dengan humanisme sebagai sebuah ideologi<sup>177</sup>

Dan dijelaskan lagi oleh Louis Althusser;

“This rupture with every *philosophical* anthropology or humanism is no secondary detail; it is Marx’s scientific discovery”<sup>178</sup>

“Keterpisahan ini dengan setiap filosofis humanisme antropologi atau tidak sekunder ;adalah penemuan ilmiah Marx”

Dengan konsep keterpisahan epistemologis yang diambil dari konsep Bachelard ini, Louis Althusser memulai membaca kembali karya Marx. dan memahami keterpisahan epistemologi dalam setiap karya Marx sehingga dapat menemukan inti pemikirar Marx dengan berkesimpulan bahwa Marx telah menciptakan sebuah saint baru, seperti yang dikatakanya;

“Dengan memakai Konsep Bacherlard, saya percaya kita bisa menyebut moment teoritis yang menasbihkan saint Baru ini sebagai sebuah pemeutusan epistemlogis... Marx telah membangun sebuah sains baru, dengan kata lain dia mengelaborasi sebuah system konsep saintifik yang baru, dimana yang ada sebelumnya hanya manipulasi gagasan-gagasan ideologis”<sup>179</sup>

<sup>176</sup> ibid

<sup>177</sup> Ibid

<sup>178</sup> Ibid

<sup>179</sup> Althusser, Louis. *Essays on*

Saint dalam atrian disini yang coba diungkap oleh Althusser, adalah saint yang merujuk pada pemikiran yang ketat atas disiplin berfikir teoritis atau bekenaan dengan ide (*ideel*) dan bersifat demonstratif. Jadi bukan agregat dari hasil pengamatan empiris.

Maka dalam memahami pemikiran harus berdasar pada karya Marx yaitu *Capital* dan *Capital* merupakan karya yang menjadi dasar atas penilaian terhadap Marx, Hanya atas dasar pemahaman *Capital* , itu kita harus menilai Marx, dan bukan atas dasar 'Karya-karya Awalnya yang masih berwatak idealis (1841-1844); juga bukan atas dasar karya-karya yang masih sangat ambigu seperti *The German Ideology* atau bahkan *Grundrisse*. *Capital* sebagai teori saintifik merupakan sebuah teori praksis yang merupakan kitab bagi kaum buruh untuk membedah akar ketertindasan mereka dalam mekanisme-mekanisme kerja sistem kapitalisme. Louis Althusser beranggapan tanpa teori saintifik tidak akan ada praktek saintifik, dengan kata lain tidak akan ada praktek yang nantinya akan menghasilkan saintifik yang baru, dengan demikian harus ada landasan dasar yang seharusnya menjadi sebuah pijakan saint.<sup>180</sup>

*Capital*, karya Marx menurut Althusser merupakan salah satu penemuan terbesar dalam dalam saintik , penemuan yang merupakan teori saintifik yang menyikap tentang "Benua Sejarah" bahkan dibandingkan oleh Louis Althusser dengan penemuan dua Benua saintifik sebelum Marx,yaitu benua Metematika dan benua Fisika. Benua Matematika yang ditemukan oleh orang-orang Yunani (Thales) dan Benua Fisika yang ditemukan oleh Galileo. Althuser pun menyatakan pemahaman atas *Capital* merupakan

landasan dasar yang mendasari penemuan-penemuan dari para spesialis ilmu khusus seperti ilmu humaniora dan ilmu sosial (sejarawan, ekonom, sosiolog, psikologi sosial, sejarawan seni dan sastra, sejarawan agama dan ideolog-ideolog) untuk menjadi landasan kebenaran teoritisnya. Karena secara saintifik teori-teori tersebut “menyingkapkan” kepada saintifik benua, dimana dalam benua sejarah saintifik Marx, tersebut mereka bekerja.<sup>181</sup>

Teori Marx yang merupakan sebuah teori saintifik baru mempunyai landasan konsep saintifik dasar, landasan esensial yang harus terpenuhi dalam merumuskan teori saintifik tersebut berada dalam dua bagian, *pertama* konsep-konsep dasar, Kedua sistem konsep dasar tersebut.<sup>182</sup>

a. Konsep-konsep dasar

Konsep-konsep dasar dalam teori saintifik Marx dalam pembangunan gagasan-gagasannya bersifat *Abstrak*. Abstraksi bukan hanya merupakan wujud teorinya tapi juga menjadi metodologis analisisnya. Jika saint-saint eksperimental memiliki ‘mikroskop’ dan Marx menggunakan *abstraksi* sebagai ganti-nya, patut ditekankan abstraksi yang digunakan tidak sama sekali bersifat *abstrak*.

Ketika Marx membicarakan tentang total kapital sosial, memang tidak dapat disentuh dengan tangan. Ketika Marx berbicara tentang ‘nilai lebih’ memang tidak ada orang yang dapat menyetuhkannya dengan tangan, sehingga konsep yang digambarkan Marx adalah abstrak, tapi konsep yang digambarkan oleh Marx merujuk pada realitas yang benar-benar ada dan konkret terjadi

dalam mekanisme sistem kapital, yang membuat abstraksi ini menjadi saintifik adalah bahwa abstraksi tersebut menunjuk pada realitas yang kongkret sungguh-sungguh ada, namun tidak mungkin untuk disentuh dengan tangan. Objek tersebut merupakan sebuah objek yang tidak bisa dimunafikan keberadaannya, dan semua itu merupakan penjelasnya dalam kehidupan material manusia. Sehingga dalam menjelaskannya tidak akan menemukan kesulitan pada dasarnya. Karena itu, setiap konsep abstrak akan menghasilkan pengetahuan, ketika sebuah eksistensi realitas dapat disikapinya.

b. Konsep-Konsep dasar yang eksis dalam sebuah sistem.

Konsep-konsep dasar yang eksis dan bekerja dalam sebuah sistem merupakan dasar terbentuknya sebuah teori,. Karena memang sebuah teori merupakan sebuah konsep saintifik yang ketat, sifat ketat (keketatan secara sistematis) merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah saint dan praktek saintifik, dan bukan merupakan kemewahan saintifik yang bersifat formal. Inilah kata Louis Althusser merupakan sifat keketatan saintifik dari 'metode penyajian' yang dirumuskan oleh Marx.

Operasi saintifik selain menjalankan kedua poin diatas dalam metode abstraksi yang ditawarkan oleh Marx. Sebagai sebuah metodologis yang digunakan dalam penemuan pengetahuan saintifik lebih menekankan pada sifat realitas sebenarnya sebagai basis utama metodologisnya dan metodologi abstrak yang digambarkan oleh

sebuah formula penyajian, dimana akan menjadi sebuah teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, setelah pemahaman atas kedua point tersebut, kedua point di atas tidak akan menjalankan prosesnya tanpa ada obyek yang menjadi basis analisisnya, maka menurut Louis Althusser obyek dari sains dalam kajian Marx khususnya dalam kajian karyanya yaitu *Capital* adalah sebagai berikut;

“... objek yang dianalisa dalam *capital* jilid satu. Marx menjelaskan kepada kita; objeknya ialah ‘modus produksi kapitalis dan relasi-relasi produksi dan pertukaran yang berhubungan dengan modus tersebut’<sup>183</sup>

## **H. Modus Produksi**

Marx memulai dari titik pijak mendasar tentang sejarah produksi manusia. Karena binatang memuaskan kebutuhan mereka dengan apa yang diberikan oleh alam, manusia harus memproduksi makanan dan pakaian serta tempat berlindung sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu manusia harus menghasilkan alat-alat untuk mengubah apa yang diberikan oleh alam hingga menjadi barang-barang yang tepat untuk kebutuhannya. Seiring percepatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utamanya, dia memiliki kebutuhan baru, yang juga secara meningkat bisa memenuhi kebutuhannya dengan kegiatan produktivitasnya. Titik pijak Marx kemudian ialah bahwa manusia menjadi penghasil materi kehidupannya yang semakin meluas. Manusia tidaklah terbatas dalam kebutuhannya, dia memiliki kekuatan untuk

dalam kegiatan produktif yang berlangsung dalam kekuatan kreatif, yang secara terus menerus mengubah dunia material dan mengubah dirinya.<sup>184</sup>

Bangunan sosial itu muncul dari sebuah modus produksi yang dominan.<sup>185</sup> Hubungan produksi dan tenaga produktif merupakan Modus produksi. Bentuk dan sifat hubungan produksi tersebut ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemilikan atas alat-alat produksi, bukan ditentukan oleh kekuatan produksinya, misalkan dalam masyarakat Kapitalisme, alat produksi dimiliki tuan kapital dan berlangsung hubungan masyarakat sosio-produksi kapitalisme, buruh yang tidak memiliki alat produksi seperti mesin untuk berproduktivitas harus bekerja terhadap kaum Borjuis untuk memenuhi kebutuhannya, dan hasil kerja para buruh menjadi milik kaum borjuis dan buruh tidak memiliki bagian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Dan untuk mempertahankan relasi-relasi produksi yang ada, maka para pemilik modal harus melakukan reproduksi syarat-syarat produksinya, karena dalam modus produksi tenaga produktif bersifat aktif. Sifat perkembangan alat kerja membentuk sifat dan keahlian tenaga kerja, ini disebabkan karena adanya interaksi manusia dengan alam yang dahulu di jaman komunal primitif alat kerja dari batu dan tongkat berkembang menjadi panah, parang, dan di zaman feodal berkembang menjadi alat kerja yang terbuat dari logam dan pada zaman kapitalisme industri alat kerja tersebut berkembang menjadi mesin dan seterusnya. Dengan alat kerja itu manusia berkembang kemampuannya, sedangkan hubungan produktif yang bersifat pasif mempunyai peran yang menentukan bentuk modus produksi.

## I. Reproduksi Kapital

Keberadaan tatanan sistem sosial merupakan indentifikasi yang menandakan adanya sebuah proses produksi yang bekerja. Karena prasyarat utama eksistensi sistem sosial adalah adanya produksi sosial untuk menghasilkan produk-produk yang merupakan pemenuhan utama kebutuhan masyarakat.

Dalam kajian sistem modus produksi kapitalis , hasil produksi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan nilai pakai, tapi lebih pada produksi komoditi yang hanya untuk dapat menghasilkan nilai lebih. Demi menghasilkan nilai lebih para kapitlis akan membelanjakan modalnya untuk dua hal yang pertama, untuk membeli alat-alat produksi dan sebagian akan digunakan untuk membeli tenaga kerja.

Maka dalam proses utama pemenuhan kebutuhan produksi harus ada proses reproduksi syarat-syarat produksi. Karena bukanlah hal yang mungkin dimana proses produksi harus dikerjakan secara bersama dengan prasyarat-prasyarat untuk produksi. karena memang sebuah kebutuhan utama dalam produksi adalah untuk mereproduksi syarat-syarat produksinya. Reproduksi dari syarat-syarat produksi merupakan kejadian yang teridentifikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan berada diluar kesadaran masyarakat. Sehingga memungkinkan terjadinya sudut pandang reproduksi (*Point of view reproduction*) dalam kesadaran seseorang, dan yang menjadi sebuah polemic berikutnya adalah Reproduksi itu bersifat abstrak dan disini yang lain telah terjadi

proses distorsi baik dalam level produksi secara afortiori pada level praktek produksinya.<sup>186</sup>

Reproduksi merupakan proses sirkulasi atas sirkulasi yang berkesinambungan, dalam proses reproduksi kapital dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan nilai-lebih yang dihasilkan dari proses produksi komoditi. maka dalam memaksimalkan tingkatan akumulatifnya, harus dilakukan pembelian kembali atau memperbaruhinya, atas dua kekuatan produktif yaitu alat-alat produksi dan tenaga kerja.

### **Pertama; Reproduksi Alat-alat produksi**

Dalam kajian yang lebih luas tentang produksi sosial masyarakat. Reproduksi terhadap alat-alat produksi merupakan tindakan yang menjadi sebuah keharusan dalam mempertahankan produksi. Reproduksi terhadap alat-alat produktif bukan berada dalam level reproduksi yang terkonteks seperti yang ada di perusahaan , dengan mengkritik teori pra ekonom terdahulu Marx, menurut Althusser.<sup>187</sup> memberikan pandangan yang lebih luas, bahwa reproduksi alat-alat produksi bukanlah inti sebenarnya. Tapi melainkan efek dari reproduksi yang lebih luas yaitu dalam tatanan sistem masyarakat pasar yang berada dalam tatanan nasional maupun dalam tatanan global sekalipun.

Misalkan seorang kapitalis , anggap saja kapitalis A; memproduksi sepatu kulit, otomatis dia harus memenuhi kebutuham materialnya, seperti kulit, mesin dan lain-lain.

Tapi 'produksi material' itu tidak diprodusi sendiri. Di situ...

kapitalis B; memproduksi bahan kulitnya, sementara anggap saja C; yang membuat mesinya, dan untuk bisa menghasilkan produk tersebut merupakan sebuah syarat yang mengikuti produksi yang lainnya, dan ini terjadi secara terus-menerus dan merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Proses reproduksi tersebut terjadi mengikuti hukum pasar yang berkembang.

### **Kedua;Reproduksi Tenaga kerja**

Setelah kita membahas salah satu ketentuan yang harus dimiliki kapital untuk bisa memproduksi, maka berikutnya bahwa alat-alat produksi tersebut tidak akan dengan sendirinya melakukan kegiatan produksi, tanpa adanya kekuatan produktif yang satunya yaitu tenaga kerja.

Kerja merupakan bentuk kegiatan produksi yang alamiah dari manusia, dan bahkan eksistensi manusia ditentukan oleh Kerja.<sup>188</sup> Dan perwujudan material atas kerja yang dilakukan oleh manusia, diganti dengan upah. Dimana Upah kata Marx merupakan bentuk yang dibuat untuk membayar tenaga kerja.<sup>189</sup>

Tingkatan upah itu dihitung dari seberapa ketentuan nilai yang dikeluarkan dalam pemenuhan atas produksi suatu barang, maka upah hanya sebagai *supleyer* atas pemulihan kembali tenaga pekerja yang dikeluarkan, dan hanya pada level itu tidak lebih. Ini seperti yang diungkapkan oleh Louis Althusser;

“ Upah itu ‘bekerja’ karena upah hanya mempresentasikan sebagian dari nilai yang dikeluarkan oleh kekuatan tenaga kerja untuk memproduksi dirinya; dengan kata lain, merupakan bagian dari sekian pengeluaran yang



keterampilan dan dalam pemenuhan kebutuhan kekuatan yang berada diluar sistem proses produksi itu harus ada.

Ketentuan proposionalitas untuk memenuhi kebutuhan reproduksi tenaga kerja melalui pembentukan instansi melalui sistem pendidikan kapitalis (bentuk dari Aparatus Ideologis Negara). Dalam mekanisme sistem pendidikan yang berada dalam kontruk kapitalisme, pembelajarannya lebih menekankan pada pengetahuan praktis (*Know-how*). Keanekaragaman kebutuhan tenaga produksi yang nanti akan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan sistem kapital, menuntut kepada instansi pendidikan untuk mengfokuskan pendidikan lebih pada teknis yang mempunyai kespesifikan bidang masing-masing. Namun selain mempelajari pengetahuan bersifat teknis, disamping itu peserta didik juga mempelajari 'aturan-aturan' tentang perilaku yang menunjukkan pemberlakuan ketaatan terhadap pembagian kerja yang sudah ditentukan untuk pemenuhan sistem kapital. Jadi menurut Louis Althusser ; aturan-aturan moralitas, nurani kewarganegaraan dan profesional, yang secara aktual merupakan atauran-atauran penghormatan terhadap pembagian kerja secara sosio-historis dan pada dasarnya aturan-aturan tersebut dibangun oleh dominasi kelas.<sup>192</sup>

Dalam menjaga proses reproduksi tenaga kerja. Kelas yang dominan atau para pemilik modal membentuk sebuah sistematis melalui sebuah instansi pendidikan yang bermain dalam bawa sadar pekerja, yaitu dengan mencoba membentuk tingkatan proposionalitas misalakan dengan membentuk kultur kurikulum yang berlandaskan pada aspek teknis pemenuhan kebutuhan perusahaan Kapital. Selain itu

<sup>192</sup> Althusser, Louis. *Essays on Ideology*. London: Routledge, 1984.

juga dalam pemenuhan aspek teknis juga harus ada pemenuhan terhadap atauran-aturan yang lebih bersifat pada pembentukan keperibadian dalam aspek moralitas untuk menghormati ketentuan-ketentuan pembagian kerja.

Dengan kata lain keberadaan lembaga pendidikan, dan instansi-instansi yang dibentuk Negara yang juga bergerak dalam aspek moralitas seperti instansi keagamaan, dan juga yang mengajarkan aspek 'penegtahuan praktis' *know how* berfungsi untuk menjamin ketertundukan kepada ideologi yang berkuasa atau penguasaan atas 'praktek' penundukan. <sup>193</sup>Dan dengan demikian artinya ada realitas baru yang hadir dalam mekanisme kerja sistem kapitalisme. yaitu *ideologi*. dan yang harus ditekankan sekali lagi adalah, pembahasan tentang ideologi tidak bisa diselesaikan tanpa melihat relasi-relasi produksi yang ada, karena dariinilah ideologi itu berada